

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK WISATA PADA PROPINSI BALI, YOGYAKARTA DAN SUMATERA UTARA**

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai obyek wisata di Indonesia yang terdiri atas obyek wisata di propinsi Bali, obyek wisata di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan obyek wisata di propinsi Sumatera Utara.

#### **2.1. Obyek Wisata Propinsi Bali**

Bali adalah sebuah pulau di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu provinsi Indonesia. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya ialah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal sebagai Pulau Dewata. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Bali terletak di 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Lintang Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Gunung Agung adalah titik tertinggi di Bali setinggi 3.148 m. Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret 1963. Gunung Batur juga salah satu gunung yang ada di Bali. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi. Berbeda dengan di bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai. Tempat-tempat penting lainnya adalah Ubud sebagai pusat seni terletak di Kabupaten Gianyar; sedangkan Kuta, Sanur, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua adalah beberapa tempat yang menjadi tujuan pariwisata, baik wisata pantai maupun tempat peristirahatan.

Pariwisata di daerah Bali merupakan sektor paling maju dan berkembang, tetapi masih berpeluang untuk dikembangkan lebih modern lagi. Daerah ini memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya. Wisata alam, misalnya meliputi 47 obyek wisata, seperti panorama di Kintamani, Pantai Kuta, Legian, Sanur, Tanah Lot, Nusa Panida, Nusa Dua, Karang Asem, Danau Batur, Danau Bedugul, Cagar Alam Sangieh, Taman

Nasional Bali Barat, dan Taman Laut Pulau Menjangan. Wisata budaya meliputi 83 obyek wisata, seperti misalnya wisata seni di Ubud, situs keramat Tanah Lot, upacara Barong di Jimbaran dan berbagai tempat seni dan galeri yang sekarang banyak bermunculan di beberapa tempat di Pulau Bali. Obyek wisata budaya ini sangat berkembang pesat, apalagi banyak karya seni yang dihasilkan oleh pelukis dan pematung dari Bali. Harga lukisan dan patung buatan Bali, harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan, ada beberapa pelukis *bule* yang sudah lama menetap di Bali, seperti Mario Blanko, Arie Smith, Rudolf Bonner dan sebagainya.

Begitu pula dengan wisata sejarah, dapat dilihat berbagai peninggalan sejarah beberapa kerajaan seperti Karangasem, Klungkung, dan Buleleng. Potensi obyek wisata di Bali yang telah menyumbang devisa negara dan pendapatan asli daerah Bali, sebenarnya masih potensial untuk dikembangkan lebih maju lagi. Kota Denpasar yang strategis dan memiliki fasilitas cukup baik dalam hal jasa perdagangan, serta punya bandar udara internasional, harus dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pelayanan pariwisata dan perdagangan internasional.

Data wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada 2006, menurut BPS, mencapai 1.328.929 orang. Jumlah wisatawan mancanegara tersebut menurun sebesar 3,51% dibandingkan 2005 yang mencapai 1.454.804. Para wisatawan mancanegara itu berasal dari beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Australia, Inggris, Jerman, Perancis, Thailand, dan sebagainya. Jumlah hotel di seluruh Bali sampai 2006 ada sekitar 1.566 unit, dengan kapasitas kamar sebanyak 40.840 buah. Selain keindahan panoramanya, daya tarik pariwisata Bali antara lain juga dipengaruhi oleh kekhasan kesenian dan kebudayaannya, termasuk ritual agama Hindhu yang dianut mayoritas orang Bali, serta keramahan masyarakat di sana.

Sejak pertengahan 1980-an, di Bali mulai berkembang wisata jurang dan lembah sungai. Salah seorang perintis wisata jurang ini adalah I Wayan Munut, yang membeli tanah di tepi jurang, untuk selanjutnya dibangun sebuah *bungalow*. Kemudian hal ini menjadi *ngetrend* di Bali hingga sekarang ini. Harga tanah yang pada awal 1980 di daerah lembah atau jurang ini hanya Rp 125.000-175.000 per

are. Kini harga tanah jurang sudah mencapai ratusan juta rupiah per are. Ternyata banyak wisatawan mancanegara yang gemar (menggemari) wisata jurang, lembah, dan sungai ini.

Tempat hunian yang sekarang digemari wisatawan asing di Bali adalah Hotel yang dibangun di lereng-lereng tebing atau jurang, yang memberikan suasana magis bagi para penghuninya. Kalau pada 1970 hingga 1980-an, hotel atau losmen di tepi pantai yang mereka gemari, sekarang sudah berubah. Banyak wisman lebih senang menyepi atau menikmati wisata spiritual. Karena indahnya berbagai obyek pariwisata di Bali itu, citra (*image*) Bali lebih terkenal daripada Indonesia, di mata orang asing. Dan ini artinya dollar masih terus mengalir ke Pulau Dewata.

Provinsi Bali memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Dalam tata pemerintahannya terkenal dengan pemerintahan dinas dan adat. Keberadaan lembaga adat diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Jumlah desa Pakraman pada 2005 sebanyak 1.432 buah, terdiri dari 3.945 buah Banjar Adat. Disamping itu terdapat pula 276 situs bersejarah yang masih terpelihara dengan baik. Jumlah kelompok (sekaha) seni tari di Bali mencapai 3.738 buah, seni musik/kerawitan 7.944 buah dan kelompok pesantian 1.765 buah. Kehidupan sosial budaya masyarakat Bali dilandasi filsafah Tri Hita karana, artinya Tiga Penyebab Kesejahteraan yang perlu diseimbangkan dan diharmoniskan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (Parhyangan), hubungan manusia dengan manusia (Pawongan) dan manusia dengan lingkungan (Palemahan). Perilaku kehidupan masyarakatnya dilandasi oleh falsafah “Karmaphala”, yaitu keyakinan akan adanya hukum sebab akibat antara perbuatan dengan hasil perbuatan. Sebagian besar kehidupan masyarakatnya diwarnai dengan berbagai upacara agama/adat, sehingga kehidupan spiritual mereka tidak dapat dilepaskan dari berbagai upacara ritual. Karena itu setiap saat di beberapa tempat di Bali terlihat sajian-sajian upacara. Upacara tersebut ada yang berkala, insidentil dan setiap hari, dan dikelompokkan menjadi lima jenis yang disebut Panca Yadnya, meliputi Dewa Yadnya yaitu upacara yang berhubungan dengan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa, Rsi Yadnya yaitu upacara yang berkaitan dengan para pemuka agama

(Pendeta, Pemangku dan lain-lainnya), Pitra Yadnya yaitu upacara yang berkaitan dengan roh leluhur (Upacara Ngaben, Memukur), Manusa Yadnya yaitu upacara yang berkaitan dengan manusia (Upacara Penyambutan Kelahiran, Tiga Bulanan, Otonan, Potong Gigi dan Perkawinan) dan Buta Yadnya yaitu upacara yang berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan alam (Upacara Mecaru, Mulang Pekelem).

Salah satu kearifan lokal yang lain adalah keberadaan Lembaga Subak sebagai lembaga yang mengatur tentang sistem pengairan tradisional Bali yang bersifat sosio-religius. Lembaga ini terdiri dari Subak yang mengelola pertanian lahan basah (sawah) dan Subak Abian yang mengelola pertanian lahan kering (tegalan). Pada tahun ini terdapat 1.312 subak.

## **2.2. Obyek Wisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dalam peta kepariwisataan nasional, potensi DIY menduduki peringkat kedua setelah Bali. Penilaian tersebut didasarkan pada beberapa faktor yang menjadi kekuatan pengembangan wisata di DIY. Pertama, berkenaan dengan keragaman obyek. Dengan berbagai predikatnya, DIY memiliki keragaman obyek wisata yang relatif menyeluruh baik dari segi fisik maupun non fisik, di samping kesiapan sarana penunjang wisata. Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta relatif memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Disamping itu, terdapat tidak kurang dari 70.000 industri kerajinan tangan, dan sarana lain yang amat kondusif seperti fasilitas akomodasi dan transportasi yang amat beragam, aneka jasa boga, biro perjalanan umum, serta dukungan pramuwisata yang memadai, tim pengamanan wisata yang disebut sebagai Bhayangkara Wisata. Potensi ini masih ditambah lagi dengan letaknya yang bersebelahan dengan Propinsi Jawa Tengah, sehingga menambah keragaman obyek yang telah ada. Kedua, berkaitan dengan ragam spesifisitas obyek dengan karakter mantap dan unik seperti Kraton, Candi Prambanan, kerajinan perak di Kotagede. Spesifikasi obyek ini masih didukung oleh kombinasi obyek fisik dan obyek non fisik dalam paduan yang serasi. Kesemua faktor tersebut memperkuat daya saing DIY sebagai propinsi tujuan utama (*primary destination*) tidak saja bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Sebutan Prowirotaman dan Sosrowijayan sebagai

'kampung internasional' membuktikan kedekatan atmosfer Yogyakarta dengan 'selera eksotisme' wisatawan mancanegara.

Menurut penelitian Puslitbang Pariwisata pada tahun 1990, pariwisata Yogyakarta memiliki beberapa kekuatan daya tarik, seperti iklim yang baik, atraksi pemandangan yang beragam, budaya yang menarik dan sejarah, masyarakat yang ramah dan bersahabat, akomodasi khas, gaya hidup, harga yang pantas. Ragam obyek wisata Yogyakarta seluruhnya terdiri atas 31 obyek wisata budaya dan 19 obyek wisata alam. Secara lebih terperinci, obyek-obyek tersebut digolongkan dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Obyek Wisata Alam, yang berupa obyek wisata pantai, pegunungan, dan goa;
2. Obyek Wisata Sejarah, yang berupa peninggalan sejarah kerajaan, petilasan, pemakaman, candi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Kraton Yogyakarta, Tamansari (Water Castle); Makam Imogiri (makam raja-raja Mataram); Candi Prambanan, Candi Kalasan, Petilasan Ratu Boko, dan lain-lain,
3. Obyek Wisata Budaya, yaitu berupa obyek budaya publik yang sampai kini masih terpelihara, baik yang berujud kesenian maupun adat istiadat, seperti Sendratari Ramayana, Wayang Kulit, Wayang Golek, Sekaten, Grebeg Maulud, Grebeg Syawal, Grebeg Besar, dan Labuhan.

Di samping itu ada beberapa potensi obyek wisata yang masih dalam pengembangan yang tersebar di setiap Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota), yaitu :

1. Obyek Wisata Alam
  - *Kabupaten Bantul*  
Goa Selarong, Pantai Pandansimo, Pantai Pandanpayung, Pantai Samas, Gunung Pasirlanang, Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Parangwedang.
  - *Kabupaten Kulonprogo*  
Goa Kiskendo, Pegunungan Samigaluh, Gunung Gajah,

Sendangsono, Pantai Congot, Pantai Pasir Mendit, Pantai Dukuh Bayeman, Pantai Palihan, Pantai Glagah, Pantai Dukuh Trukan, Pantai Pandan Segegek

– *Kabupaten Gunungkidul*

Goa Girijati, Goa Langse, Goa Grengseng, Goa Ngluaran, Goa Parang Kencono, Pemandangan Ereng, Gunung Batur, Gunung Gambar, Lokasi Olahraga Layang Gantung (bukit Kecamatan Pathuk dan Kecamatan Panggang); Hutan pendidikan Wabagama, Hutan Bunder, Pantai Langkap, Pantai Butuh, pantai Baron, Pantai Sili, Pantai Krakal, Pantai Sungap, Pantai Wediombo, Pantai Sadeng, Pantai Ngongap

– *Kabupaten Sleman*

Lereng Gunung Merapi

2. Obyek Wisata Buatan

– *Kotamadya Yogyakarta*

Benteng Vrederburg, peninggalan-peninggalan kraton seperti Panggung Krapyak, Kraton Pakualaman, Makam Kotagede

– *Kabupaten Bantul*

Makam Imogiri

– *Kabupaten Gunungkidul*

Situs Sokoliman, Situs Mangunan, Situs Beji, Situs Ngluweng, Candirejo, Candi Risan

– *Kabupaten Sleman*

Candi Gebang, Candi Sambisari, Candi Banyunibo, Petilasan Ratu Boko, Candisari Sokogedhug, Candi Ijo, Candi Prambanan, Candi Kalasan

3. Kesenian dan Tradisi

– *Kotamadya Yogyakarta*

Wayang kulit, wayang golek, wayang klitik, wayang wong, kesenian

tari, tari klasik, tari modern, seni Tayub, Ketoprak, Serandul, upacara siraman pusaka kraton, upacara Sekaten, kuda lumping

– *Kabupaten Bantul*

Obyek wisata kesenian dan tradisi

Jathilan, Gejok Lesung, Kethoprak, upacara Rebo Wekasan, upacara Kupatan Jolosutro, upacara labuhan

– *Kabupaten Kulonprogo*

Upacara adat Labuhan (oleh keluarga Pakualaman)

– *Kabupaten Gunungkidul*

Jathilan, Gejog Lesung, Reyok, Kethoprak, Upacara Rebo Wekasan, upacara Kupaten Jolosutro, upacara Labuhan, upacara Bersih Telaga

– *Kabupaten Sleman*

Kesenian Angguk, Jathilan, Badui, Wayang Kulit

4. Peninggalan Sejarah Perjuangan dan Monumen

Petilasan Sunan Kalijogo, Petilasan Ki Ageng Pemanahan, Monumen Gelaran, Monumen Stasiun Radio AURI, Rute Gerilya Jendral Sudirman, Makam Nyi Ageng Serang, Makam Girigondo, Monumen Yogya Kembali.

5. Museum

Museum Sonobudoyo, Museum Pangeran Diponegoro Wirotoomo, Museum Angkatan Darat, Museum Perjuangan, Museum Biologi UGM, Museum Khusus Dirgantara, Museum Dewantoro Kirti Griya, Museum Affandi, Museum Kraton, Benteng Vrederburg.

Bahasa pengantar umumnya menggunakan bahasa Jawa yang sekaligus juga menunjukkan etnis yang ada di provinsi DIY adalah saku/etnis Jawa. Aset budaya yang di miliki meliputi budaya yang bersifat fisik (tangible) dan non-fisik (intangibile). Kondisi budaya fisik (tangible) meliputi:

1. Kawasan cagar budaya berjumlah 13 Kawasan Cagar Budaya (KCB), tersebar di 4 Kabupaten dan Kota terdiri dari 6 KCB di wilayah urban kota, 3 KCB di wilayah Suburban. Potensi Benda Cagar Budaya yang dimiliki sebanyak 365 buah.

2. Kondisi keberadaan Permuseuman. Potensi museum yang di miliki baik museum negeri maupun museum swasta berjumlah 30 museum yang terdiri dari 14 museum Benda Cagar Budaya dan Kesenian, 7 museum Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan serta 9 museum Perjuangan. Keberadaan museum Kota Yogyakarta 18 buah, Kabupaten Sleman 9 buah, Kabupaten Bantul 2 buah, dan Kabupaten Gunung Kidul 1 buah.

Kondisi budaya nin-fisik (intangible), antara lain:

1. Kondisi Kesenian

Potensi budaya Non-fisik meliputi kesenian dalam berbagai jenis dan seni rupa, seni tari, seni musik, seni teater, dan lainnya. Dari sisi jumlah organisasi dan group kesenian DIY sebanyak 2863 buah yang tersebar di empat kabupaten dan kota.

2. Kondisi Adat dan Tradisi

Upacara adat adalah salah satu kegiatan budaya masih di lakukan oleh masyarakat. Di kota Yogya masih dilakukan 5 upacara adat, Kabupaten Sleman terdapat 11 upacara adat, Kabupaten Bantul terdapat 24 upacara adat, Kabupaten Kulon Progo terdapat 10 upacara adat, dan Kabupaten Gunung Kidul terdapat 16 upacara ada pada 9 Kecamatan.

3. Bahasa Daerah

Yogyakarta merupakan pusat bahasa dan sastra Jawa yang meliputi bahasa parama sastra, ragam sastra, basastra, dialek, sengkala serta lisan dalam bentuk dongeng, japamantra, pawukon, dan aksara Jawa.

4. Prasarana Budaya

Prasaran budaya sebagai penunjang terhadap kelestarian dan pengembangan kreativitas seniman telah ada sebanyak 130 buah dalam berbagai bentuk, seperti panggung, pendopo, ruang pameran, ruang pertunjukan, studio musik balai desa, auditorium, sanggar, lapangan, sedangkan pusat-pusat pelestarian budaya tradisional yang disebut desa budaya, terdapat kurang lebih 60 desa budaya dan 22 desa wisata dengan potensi fisik maupun non fisik.

## 5. Lembaga Budaya

Di provinsi ini berjumlah 178 lembaga terdiri dari yayasan, organisasi, lembaga pendidikan, instansi pemerintah serta organisasi yang melestarikan nilai budaya daerah. Pembentukan lembaga ini dalam rangka mengikuti perubahan yang sangat cepat dan tidak diimbangi dengan kesiapan budaya bangsa dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai, untuk itu pemerintah provinsi melalui potensi dan sumber budaya yang dimiliki mengolah budaya setempat sebaik mungkin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.

### 2.3. Obyek Wisata Propinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera, berbatasan dengan Aceh di sebelah utara dan dengan Sumatera Barat serta Riau di sebelah selatan. Provinsi ini terutama merupakan kampung halaman suku bangsa Batak, yang hidup di pegunungan dan suku bangsa Melayu yang hidup di daerah pesisir timur. Selain itu juga ada suku bangsa Nias di pesisir Barat Sumatera, Mandailing, Jawa dan Tionghoa. Sumatra Utara pada dasarnya dapat dibagi atas:

- Pesisir timur
- Pegunungan Bukit Barisan
- Pesisir barat
- Kepulauan Nias.
- Kepulauan Batu.
- Pulau Samosir di danau Toba.

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya Di daerah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini ada beberapa dataran tinggi yang merupakan kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir juga menjadi tempat tinggal penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Di pesisir barat relatif tertinggal dan merupakan titik berat pembangunan sejak pemerintahan

Gubernur Raja Inal Siregar dengan program pembangunannya yang terkenal, Marsipature Hutana Be disingkat Martabe atau MHB. Pesisir barat biasa dikenal sebagai daerah Tapanuli. Terdapat 419 pulau di propinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah pulau Simuk (kepulauan Nias), dan pulau Berhala di selat Malaka. Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sitoli. Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar: Sibulasi, Pini, Tanahbala, Tanahmasa. Pusat pemerintahan di Pulautelelo di pulau Sibulasi. Kepulauan Batu terletak di tenggara kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatera Utara: Imanna, Pasu, Bawa, Hamutaia, Batumakalele, Lego, Masa, Bau, Simaleh, Makole, Jake, dan Sigata, Wunga.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antarkabupaten maupun antarprovinsi. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatra Utara dibagi ke dalam empat wilayah Pembangunan. Di Sumatera Utara terdapat 2.098,05 kilometer jalan negara, yang tergolong mantap hanya 1.095,70 kilometer atau 52,22 persen dan 418,60 kilometer atau 19,95 persen dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752,41 kilometer jalan propinsi, yang dalam keadaan mantap panjangnya 1.237,60 kilometer atau 44,96 persen, sementara yang dalam keadaan sedang 558,46 kilometer atau 20,29 persen. Halnya jalan rusak panjangnya 410,40 kilometer atau 14,91 persen dan yang rusak berat panjangnya 545,95 kilometer atau 19,84 persen. Dari sisi kendaraan, terdapat lebih 1,38 juta kendaraan roda dua dan empat di Sumatera Utara. Dari jumlah itu, sebanyak 873 ribu lebih berada di Kota Medan.

Data tahun 2006 menunjukkan bahwa jumlah hotel di seluruh daerah Sumatra Utara berjumlah 647 hotel, terdiri dari hotel bintang 1 berjumlah 190

unit, hotel bintang 2 berjumlah 200 unit, hotel bintang 3 berjumlah 80 unit dan hotel bintang 4 berjumlah 80 unit. Hotel bintang 4 hanya terdapat di Medan, Dairi, dan Asahan. Hotel bintang 3 terdapat di Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Asahan, dan Nias. Jumlah kamar hotel untuk hotel bintang 1 sekitar 1.929 kamar; bintang 2 berjumlah 2.157 kamar; hotel bintang 3 berjumlah 1.875 kamar; dan hotel bintang 4 berjumlah 8.293 kamar.

Daerah Sumatra Utara memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam dalam bentuk adat istiadat, seni tradisional, dan bahasa daerah. Masyarakatnya terdiri atas beberapa suku, seperti Melayu, Nias, Batak Toba, Pakpak, Karo, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan (meliputi Sipirok, Angkola, Padang Bolak, dan Mandailing); serta penduduk pendatang seperti Minang, Jawa dan Aceh yang membawa budaya serta adat-istiadatnya sendiri-sendiri. Daerah ini memiliki potensi yang cukup baik dalam sektor pariwisata, baik wisata alam, budaya, maupun sejarah.

Wisatawan asing yang datang ke Bandara Polonia pada tahun 2006 berdasarkan data BPS menurut negara asal adalah dari Asia berjumlah 94.107 orang, terdiri dari wisatawan Jepang 1.591 orang, Korea Selatan 463 orang, Taiwan 2.564 orang, Thailand 1.036 orang, Singapura 6.691 orang, Malaysia 69.108 orang, China 1.356 orang dan India 1.272 serta asia lainnya berjumlah 4.210 orang. Sedangkan wisatawan dari Australia 2.208 orang, Selandia Baru 268 orang, Amerika Serikat 3.299 orang, Kanada 730 orang, Inggris 2.118 orang, Belanda 5.064 orang, Jerman 2.918 orang, dan dari negara Eropa lainnya dalam jumlah lebih dari 2000 orang.

## **BAB III**

### **KERANGKA TEORI**

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan batasan pengertian bersifat mendasar atau umum dan penting untuk diketahui yang berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan teori mengenai motivasi berwisata, pengertian motivasi berwisata, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berwisata, pengertian pariwisata dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan, pengertian wisatawan mancanegara, pengertian produk pariwisata, pengertian keamanan, keimigrasian dan visa, transportasi, akomodasi, kurs dan *analytical hierarchy process*.

#### **3.1. Motivasi Berwisata**

##### **3.1.1. Pengertian Motivasi**

Menurut Nawawi (2000: 351) kata motivasi (*motivation*) memiliki kata dasar motif yang berarti dorongan sebab atau dasar seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Definisi yang mirip juga dikemukakan oleh Morgan (1986) yang mengemukakan bahwa motivasi sebagai dorongan yang mendorong individu untuk menampilkan tingkah laku yang persisten yang diarahkan untuk mencapai tujuan.

Atkinson (1996) menyatakan bahwa motivasi adalah faktor-faktor yang menguatkan perilaku dan memberikan arahnya. Chaplin (dalam Hardjo dan Badjuri 2002) menyatakan bahwa motivasi merupakan perubahan tenaga didalam diri seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan.

Abraham Maslow (dalam Malayu S.P Hasibuan, 2003) menyatakan bahwa manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hirarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Motivasi manusia

sangat dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi. Menurut Maslow manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling penting dahulu kemudian meningkat ke yang tidak terlalu penting. Untuk dapat merasakan nikmat suatu tingkat kebutuhan perlu dipuaskan dahulu kebutuhan yang berada pada tingkat di bawahnya. Lima (5) kebutuhan dasar Maslow disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak terlalu krusial sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis

Yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang seperti makan, minum, bernafas, perumahan dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan fisik ini merangsang seseorang untuk mencapainya dengan giat.

2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan

Yaitu kebutuhan akan keamanan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan jiwanya dimanapun ia berada. Kebutuhan akan keamanan dan keselamatan tercermin dalam hal bebas dari penjahatan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya.

3. Kebutuhan Sosial

Yaitu kebutuhan dalam hal memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain serta diterima dalam pergaulan kelompok masyarakat dan lingkungannya.

4. Kebutuhan Penghargaan

Yaitu kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestise dari masyarakat dan lingkungannya. Idealnya prestise timbul karena adanya prestasi, tetapi tidak selamanya demikian. Contoh kebutuhan penghargaan diri adalah pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, keterampilan dan potensi optimal untuk mencapai suatu keinginan sesuai dengan kehendak diri sendiri berdasarkan bakat dan

minatnya untuk kepuasan pribadi yang luar biasa yang sulit dicapai oleh orang lain.

Berdasarkan uraian pengertian tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur penting yang terkandung didalam motivasi yaitu keadaan dimana terdapat kebutuhan, dorongan, dan motif individu, kemudian perilaku, dan yang terakhir tujuan atau goal individu tersebut. Dalam kaitannya dengan kegiatan berwisata yang dilakukan oleh seseorang sebagai dorongan kebutuhan, maka diperlukan perencanaan dan persiapan dalam rangka melaksanakan dan mencapai kebutuhan tersebut sebagaimana disebutkan oleh Maslow mengenai motivasi seseorang dalam mencapai tingkat kepuasan akan kebutuhan yang tercermin dalam hirarki kebutuhan manusia tersebut.

### 3.1.2. Pengertian Motif

Tingkah laku seseorang dipengaruhi serta dirangsang oleh keinginan, kebutuhan, tujuan dan kepuasannya. Rangsangan timbul dari dalam diri sendiri dan dari luar lingkungan pribadinya. Rangsangan ini akan menciptakan motif yang mendorong seseorang beraktivitas untuk memperoleh kebutuhan dan kepuasan dari hasil aktivitasnya.

Motif berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti bergerak atau *to move*, karena itu motif dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri Individu yang mendorong untuk berbuat atau merupakan *driving force* (Branca dalam Walgito, 1997). Walgito juga menyatakan bahwa motif sebagai pendorong pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling kait-mengait dengan faktor lain. Sedangkan Atkinson & Reitman (dalam Supardi, 1987) mengemukakan bahwa motif diartikan sebagai sesuatu yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Hersey, Blanchard & Jhonson (dalam Rivai, 2003) motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motifnya. Motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan atau gerak hati dalam diri individu atau apa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu atau sekurang-kurangnya mengembangkan sesuatu (Hodgets dalam Rivai, 2003).

### 3.1.3. Jenis-Jenis Motivasi

Monks(1999) dapat membedakan motivasi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi Intrinstik

Berarti bahwa sesuatu perbuatan memang diinginkan karena seseorang senang melakukannya. Dalam hal ini, motivasi datang dari dalam diri seseorang itu sendiri. Orang tersebut senang melakukan perbuatan itu demi perbuatan itu sendiri. Terdapat beberapa komponen dari motivasi intrinstik, antara lain dorongan ingin tahu dan tingkat aspirasi.

2. Motivasi Ekstrinsik

Berarti bahwa sesuatu perbuatan dilakukan atas dorongan atau perasaan dari luar. Orang melakukan perbuatan itu karena ia didorong atau dipaksa dari luar. Chaplin menyatakan bahwa motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tidak menjadi bagian yang melekat pada tingkah laku itu sendiri.

### 3.1.4. Pengertian Motivasi Berwisata

Motivasi adalah kondisi internal yang spesifik dan mengarah pada perilaku seseorang ke suatu tujuan (Alhadza, 2003). Berwisata diartikan sebagai kepergian orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan diluar tempat tinggal dan pekerjaan sehari-harinya untuk menikmati suasana yang diinginkan (Salah Wahab dalam Pendit, 2006). Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata (UU No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata). Berwisata merupakan alternatif kegiatan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mengganggu psikologi seseorang (Pendit, 2006).

Maslow berasumsi bahwa perilaku manusia termotifasi kearah *self-fulfillment* (dalam alhadza, 2003). Setiap orang mempunyai motif bawaan yang selalu diperjuangkan untuk dipenuhi yang bergerak dari motif bawaan yang paling sederhana yaitu kebutuhan fisiologis sampai kebutuhan aktualisasi diri (Arends, 2004). Dalam kaitannya dengan kegiatan berwisata yang dilakukan oleh

seseorang yang pada saat ini merupakan kegiatan yang tergolong sebagai kebutuhan, maka diperlukan perencanaan dan persiapan dalam rangka melaksanakan dan mencapai kebutuhan tersebut sebagaimana disebutkan oleh Maslow mengenai motivasi seseorang dalam mencapai tingkat kepuasan akan kebutuhan yang tercermin dalam hirarki kebutuhan manusia tersebut.

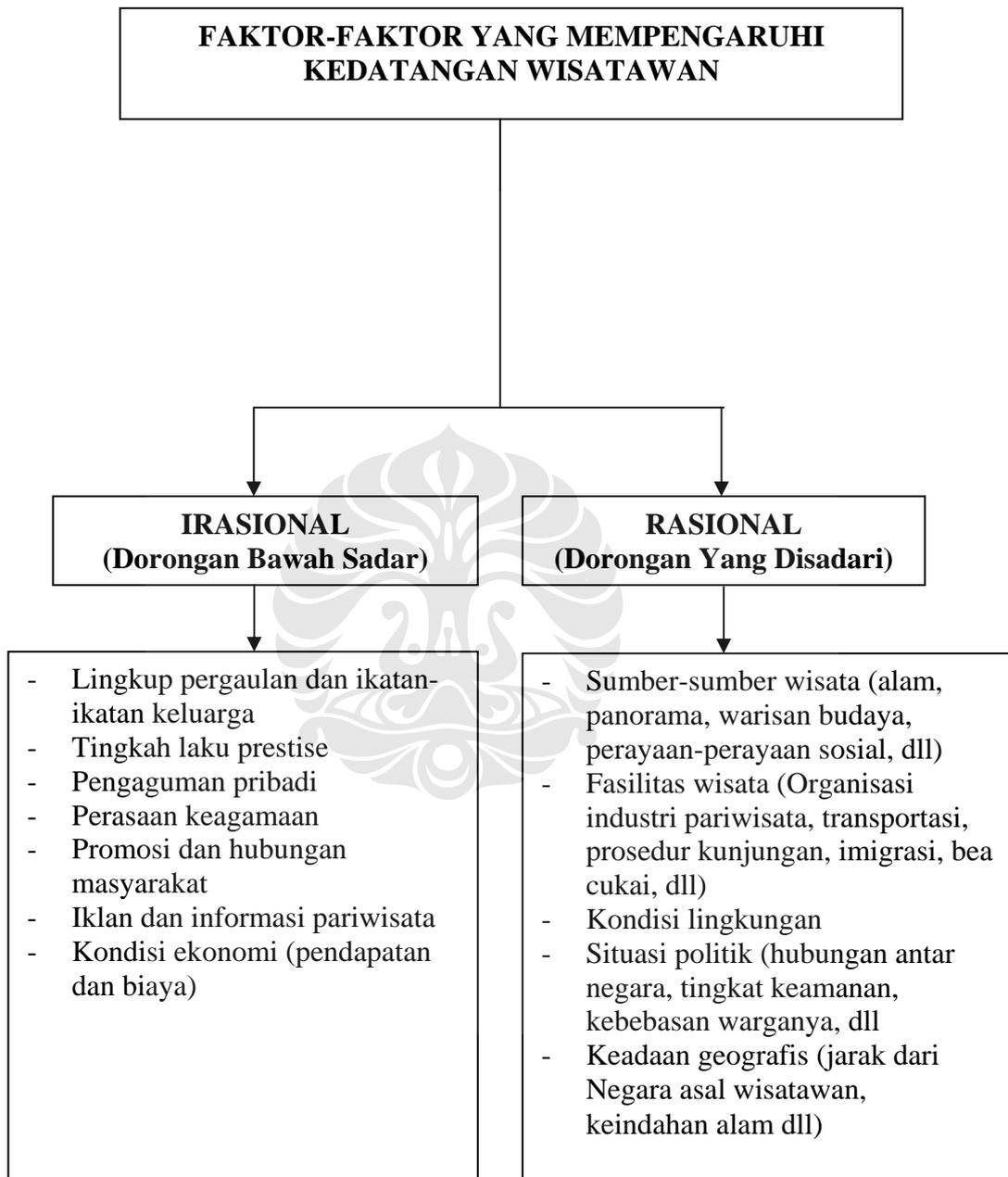
### **3.1.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Berwisata**

Ada banyak faktor yang besar pengaruhnya dalam diri seseorang ketika mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan berwisata atau tidak. Faktor-faktor ini adalah akibat terjadinya perubahan sosial, teknologi, ekonomi, budaya dan kelembagaan. Menurut Wahab (dalam Pendit, 2006) faktor-faktor yang mempengaruhi kedatangan wisatawan terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu faktor irasional (dorongan bawah sadar) dan faktor rasional (dorongan yang disadari).

Faktor irasional terdiri atas lingkup pergaulan dan ikatan-ikatan keluarga, tingkah laku prestise, tiruan dan mode, pengaguman pribadi, perasaan keagamaan, hubungan masyarakat dan promosi pariwisata, iklan dan promosi pariwisata, dan yang terakhir adalah kondisi ekonomi (berkaitan dengan pendapatan dan biaya).

Faktor rasional terdiri atas sumber-sumber wisata, fasilitas wisata (organisasi industri pariwisata, transportasi, prosedur kunjungan, imigrasi, bea cukai dan lain-lain), kondisi lingkungan masyarakat, situasi politik (hubungan antar negara, tingkat keamanan, tingkat kebebasan warganya, dan lain-lain) dan kondisi geografis (jarak dari negara asal wisatawan, keindahan alam, daya tarik obyek wisata dan lain-lain sebagainya).

Wahab (dalam Pendit, 2006) menggambarkan bagan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan berwisata sebagai berikut:



Oka A. Yoeti (1985:69) menyatakan bahwa motivasi seseorang dalam melakukan wisata ke suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor pendapatan, harga atau kurs, kualitas, hubungan politik antara dua negara, tingkat keamanan, hubungan sosial budaya antara dua negara, perubahan cuaca atau iklim, peraturan pemerintah, dan teknologi pengangkutan atau transportasi.

Faktor pertama adalah pendapatan, penghasilan seseorang merupakan faktor yang banyak sekali menentukan apakah ia akan melakukan suatu perjalanan pariwisata atau tidak. Dengan memperhatikan pendapatan, orang akan berfikir mengenai perencanaan kegiatan pariwisata yang ingin dilakukannya, mengingat kebutuhan lain yang harus dipenuhi selain kegiatan pariwisata. Namun pada saat ini, orang cenderung telah melakukan perencanaan mengenai kegiatan pariwisata yang akan ia lakukan dengan cara menyisihkan uang pendapatannya sehingga apabila ia merasa telah cukup maka ia kan melakukan kegiatan pariwisata.

Kedua adalah harga atau kurs dimana dalam teori ekonomi dikatakan bahwa perubahan harga atau kurs selalu menimbulkan akibat terhadap pendapatan. Kalau ini terjadi maka seseorang akan melakukan substitusi untuk memenuhi kebutuhannya. Berkaitan dengan harga ini, seseorang cenderung akan mempertimbangkan berapa banyak biaya yang harus ia keluarkan untuk kegiatan pariwisata ini dengan membandingkan pendapatan yang ia miliki. Dengan demikian ia memiliki persiapan seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan dan harga-harga yang dapat ia pertimbangkan berkaitan dengan kegiatan pariwisata yang akan ia lakukan.

Ketiga adalah kualitas barang atau jasa. kualitas barang atau jasa sangat mempengaruhi apakah barang atau jasa tersebut akan di beli orang, apalagi dalam persaingan yang tajam. Kualitas barang dan jasa dalam Pariwisata seperti halnya *“something to see, something to do, and something to buy”* yang terdapat pada suatu daerah tujuan akan mempengaruhi hasrat orang untuk berkunjung ke tempat tersebut. Dalam kegiatan pariwisata kualitas akan wisata merupakan faktor yang menjadi pertimbangan, mengingat dalam berwisata ini orang akan cenderung mencari kepuasan terhadap kegiatan yang ia lakukan. Kualitas ini menyagkut daya tarik obyek wisata, sarana dan prasarana obyek wisata baik dari ketersediaan atas fasilitas penginapan dan jasa lainnya, barang-barang yang ingin diperoleh ataupun

sesuatu yang tidak ada/tidak pernah diperoleh dapat diperoleh di tempat wisata tersebut.

Keempat adalah Hubungan politik antara dua negara. Bilamana hubungan politik antara dua negara baik, maka penduduk kedua negara cenderung akan saling kunjung mengunjungi. Faktor ini juga menjadi pertimbangan seseorang melakukan perjalanan wisata, hal ini berkaitan dengan kemudahan dalam melakukan perjalanan antar negara dan juga keselamatan dirinya apabila hubungan kedua negara tidak baik.

Kelima adalah tingkat keamanan. Bilamana kondisi keamanan suatu negara satabil, maka penduduk suatu negara akan berkunjung ke negara tersebut. Tingkat keamanan merupakan kunci pokok sebagai pertimbangan seseorang melakukan wisata mengingat tujuan utama wisata adalah mencapai kepuasan pribadi tanpa adanya gangguan termasuk keamanan tempat tujuan wisata.

Keenam adalah hubungan sosial budaya antara dua negara. Keeratan hubungan sejarah antara kedua negara atau bangsa akan mempengaruhi penduduk kedua negara untuk saling melakukan kunjungan.

Ketujuh adalah perubahan cuaca atau iklim. Adanya pergantian musim membuat banyak orang melakukan perjalanan pariwisata ke beberapa negara lain yang keadaan iklimnya banyak berbeda. Iklim juga berkaitan dengan keamanan seseorang dalam melakukan perjalanan, jika iklim atau cuaca mendukung untuk melakukan wisata maka orang tidak akan takut melakukan kunjungan.

Kedelapan adalah peraturan pemerintah (regulasi). Dalam melakukan perjalanan ke suatu negara seseorang memerlukan paspor kebangsaan dan visa dari negara tujuan. Oleh karena itu pelayanan dan kemudahan keimigrasian cenderung meningkatkan kunjungan seseorang ke suatu negara.

Kesembilan adalah teknologi pengangkutan atau sarana transportasi. Kemajuan luar biasa yang dicapai dibidang angkutan udara, telah sangat membantu perkembangan pariwisata. Pesawat-pesawat besar dan cepat telah membuat dunia ini terasa semakin kecil dan para wisatawan secara pribadi merasa bahwa saat ini dia sudah dapat pergi kemana saja di bumi ini tanpa banyak kesulitan dan kepergian itu masih dalam batas-batas kemampuan keuangan yang

masuk akal. Kemudahan transportasi untuk menuju ke suatu negara cenderung dapat meningkatkan minat seseorang dalam mengunjungi negara tersebut.

### 3.2. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya atau rekreasi, melihat dan menyaksikan atraksi wisata di tempat lain atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam yang mencakup keseluruhan fenomena alam maupun buatan manusia yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan wisatawan dan kegiatan-kegiatan lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama melakukan aktivitas perjalanan bukan untuk mencari nafkah (Manajemen Usaha Pariwisata Indonesia 1996:12).

Hunziker dan Krapf (1988) memberikan definisi tentang pengertian pariwisata yaitu: *“Tourism is the sum of the phenomena and relationships arising from the travel and stay of non-residents, in so far they do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity.”* (lihat Kodhyat, 1996: 76) (Pariwisata adalah keseluruhan (gejala) dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya dengan maksud bukan untuk tinggal menetap (di tempat yang disinggahinya) dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah).

Menurut Undang-Undang No.9 tahun 1990 tentang kepariwisataan terdapat beberapa istilah mengenai pariwisata antara lain :

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- c. Pariwisata adalah segala yang berhubungan dengan wisata termasuk mengusahakan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait di bidang tersebut.
- d. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

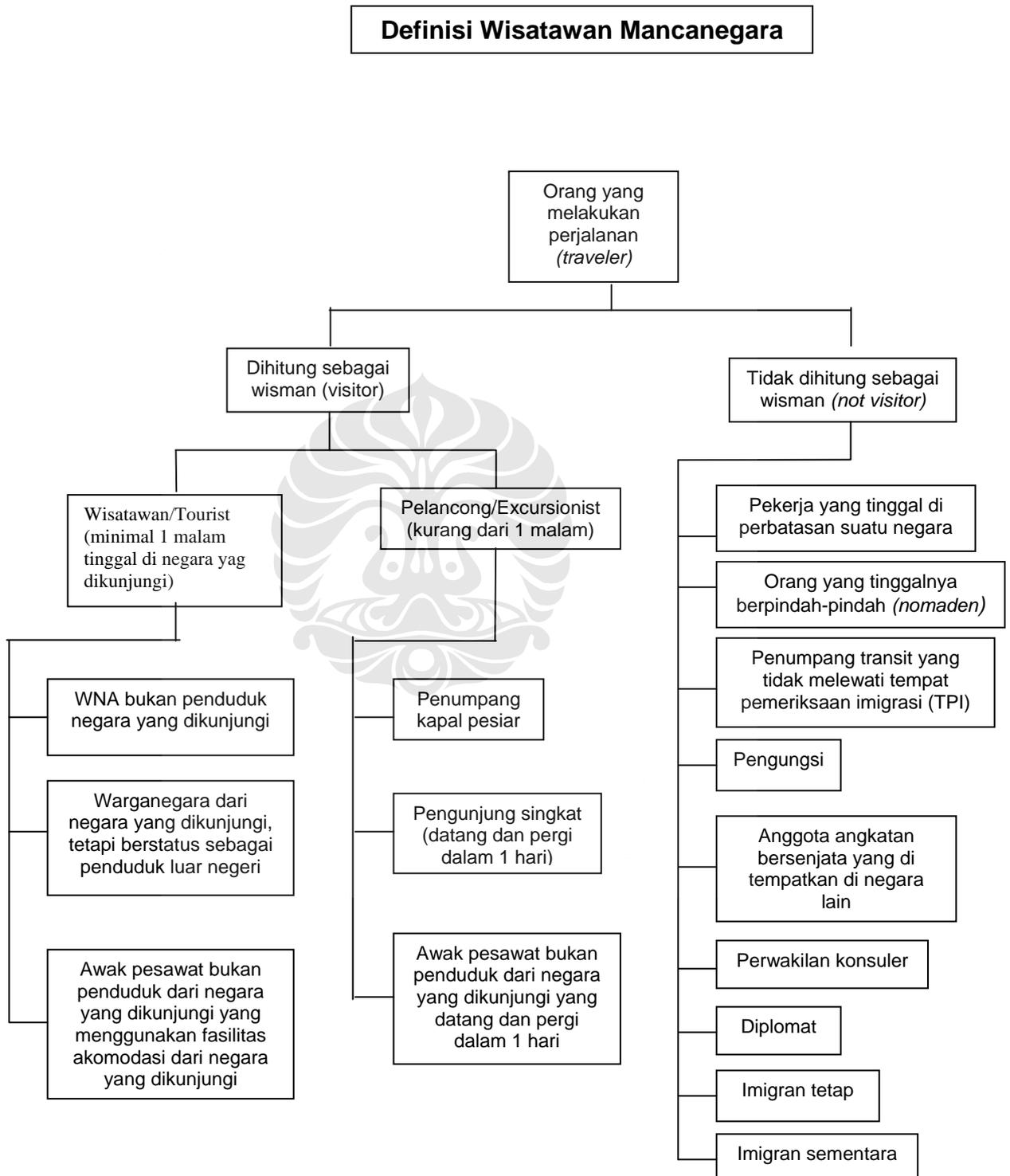
- e. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
- f. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
- g. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

### 3.3. Pengertian Wisatawan Mancanegara

Sesuai dengan rekomendasi *World Tourism Organization* (WTO) dan *International Union Office Travel Organization* (IUOTO) definisi tamu mancanegara adalah setiap orang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi. Definisi ini mencakup dua kategori tamu mancanegara

- a. Wisatawan (Tourist) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 6 bulan di tempat yang dikunjungi, dengan maksud kunjungan antara lain: berlibur, pekerjaan/bisnis, kesehatan, pendidikan, misi/pertemuan/kongres, mengunjungi teman/keluarga, keagamaan dan olahraga.
- b. Pelancong (Excursionis) adalah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi (termasuk cruise passenger). Cruise passenger adalah setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal atau kereta api, di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut.

Definisi wisatawan mancanegara menurut Wahab (dalam Pendit, 2006) dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



### 3.4. Produk Pariwisata

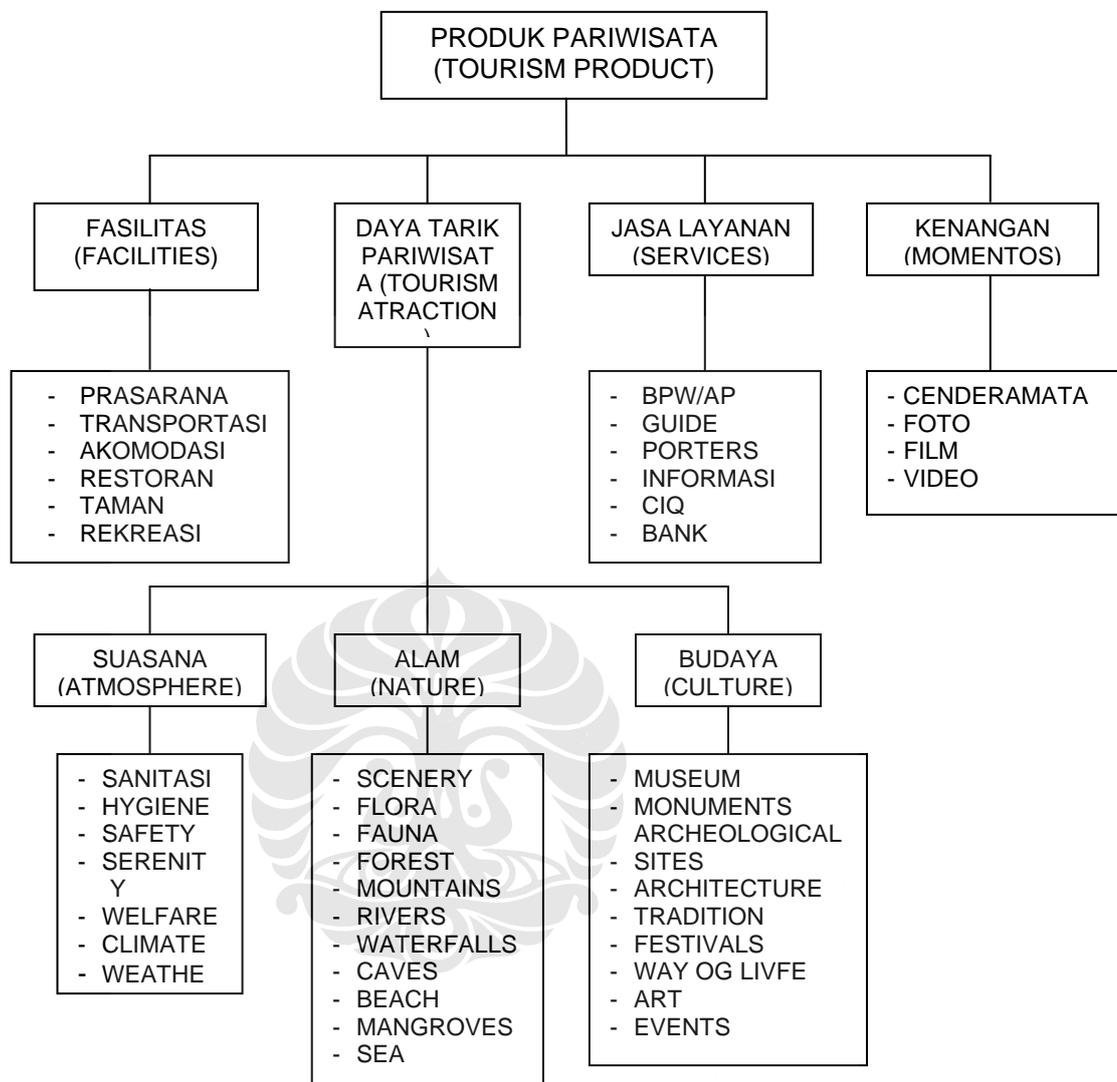
Produk pariwisata merupakan mata rantai dari serangkaian komponen dimana satu sama lainnya saling terkait. Seperti halnya dengan mata rantai, kekuatan terbesarnya terletak pada mata rantai yang terlemah. Rangkaian mata rantai produk pariwisata itu pada garis besarnya meliputi: obyek dan daya tarik wisata, kemudahan, aksesibilitas, gerbang/terminal, transfer, akomodasi, pesiar, makan/minum, hiburan sehat dan cenderamata. Tiap mata rantai tersebut dapat merupakan produk tersendiri dan terkait dengan bidang-bidang lain yang juga saling mempengaruhi, contohnya akomodasi. Akomodasi dapat menjadi salah satu mata rantai dari produk pariwisata tetapi hotel dapat juga merupakan produk tersendiri. Apabila akomodasi dijual sebagai bagian dari satu paket wisata, maka akomodasi tersebut menjadi salah satu mata rantai produk pariwisata. Tetapi jika akomodasi tersebut dijual mandiri tidak sebagai komponen paket wisata, maka akomodasi di maksud adalah menjadi produk tersendiri. Bahwa akomodasi juga terkait dan saling mempengaruhi dengan bidang-bidang lain, seperti energi listrik, air bersih, bahan makanan dan minuman. Itulah sebabnya sering dikatakan pariwisata memiliki pengaruh ganda (*multiple effect*) yang sangat besar. Beberapa contoh produk pariwisata :

- a. Obyek dan daya tarik wisata, adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat dan dialami wisatawan karena keindahannya, kelangkaannya, kekhasannya dan keuniannya menyebabkan wisatawan ingin berkunjung ke suatu tempat/daerah/negara. Obyek dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu obyek wisata alam, budaya dan buatan manusia.
- b. Fasilitas (kemudahan) adalah kemudahan yang disediakan oleh suatu negara terhadap pengembangan kepariwisataan agar wisatawan diberikan rangsangan untuk berkunjung ke suatu tempat/daerah/negara tersebut. Adapun kemudahan yang dimaksud antara lain; kemudahan mendapatkan informasi, mengurus dokumen perjalanan, membawa uang, barang, bebas visa kunjungan dan lain-lain.
- c. Aksesibilitas, adalah suatu komponen penting dalam kegiatan kepariwisataan untuk memudahkan pergerakan mobilitas wisatawan

dari suatu tempat ke tempat lain, khususnya untuk menuju lokasi daerah tujuan wisata.

- d. Akomodasi adalah suatu sarana untuk tempat penginapan bagi setiap tamunya atau pengunjung sementara, dengan mendapatkan berbagai fasilitas lainnya seperti makan dan minum, olahraga, kesehatan, hiburan dan kebutuhan lain.
- e. Perusahaan perjalanan wisata memiliki fungsi memberi jasa-jasa, sehingga yang dijual berupa tiket angkutan, kamar akomodasi dan lain-lain yang bukan merupakan produknya sendiri melainkan produk perusahaan lain, dengan mendapatkan komisi. Akan tetapi perusahaan perjalanan dapat juga membuat produknya sendiri, yaitu dengan mengemas berbagai produk perusahaan lain menjadi satu kesatuan produk untuk selanjutnya ditawarkan dan dijual sebagai paket wisata.
- f. Jasa boga adalah makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan penting bagi para wisatawan. Wisatawan menaruh harapan untuk mendapatkan makanan dan minuman yang enak, baik yang sudah dikenalnya maupun karena ingin makanan baru yang belum pernah dinikmati. Demikian pula halnya dengan Indonesia semua daerah memiliki makanan khas daerah termasuk tata sajinnya yang menarik untuk dilihat dan dinikmati.
- g. Cenderamata adalah sesuatu barang hasil kerajinan tangan yang terbuat dari kayu, rotan, batu dan gambar yang mudah dibawa oleh wisatawan sebagai kenang-kenangan.

Skema dari mata rantai Produk Wisata oleh H. Kodyat, SH dari lembaga studi pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut:



### 3.5. Pengertian Keamanan

Maslow menyatakan bahwa salah satu kebutuhan pokok manusia sebagaimana disebutkan di atas adalah kebutuhan akan keamanan dan keselamatan. Pengertian tentang keamanan sangat luas sekali, apabila kita melihat pascaperang dingin (*cold war*), konsep tentang keamanan (*security*) telah banyak mengalami perkembangan. Mely Caballero-Anthony (2004) menyebutkan minimal ada tiga pandangan tentang keamanan. Pandangan pertama adalah yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas daripada semata-

mata keamanan militer (*military security*). Pandangan kedua adalah menentang perluasan ruang lingkup daripada keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan status quo. Pandangan ketiga tidak saja memperluas cakupan bahwa keamanan adalah lebih luas dari semata-mata ancaman militer dan ancaman negara, namun juga berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia (*human emancipation*).

Emansipasi manusia bermakna: "pembebasan manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok dari keterbatasan fisik dan kemanusiaannya yang menghentikan upaya mereka untuk memperoleh kenikmatan dari hal-hal yang sepatutnya mereka dapatkan," (Booth dalam Anthony, 2004). Pandangan yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas dari semata-mata keamanan militer sering disebut sebagai paradigma keamanan non tradisional. Pihak lain menyebutnya paradigma keamanan alternatif (*alternatif security*).

Keamanan (*security*) adalah bentuk khusus dari politik. Semua masalah keamanan adalah masalah politik. Namun tidak semua konflik politik adalah masalah keamanan. Keamanan menjadi isu utama sengketa politik ketika aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain (Kolodziej, 2005 : 22).

Cakupan dari masalah politik adalah seluas dan bersamaan dengan sejarah interaksi manusia dalam dimensi ruang dan waktu ketika kekuatan atau daya paksa digunakan. Seperti halnya politik, keamanan adalah fenomena yang diciptakan oleh kehendak ataupun tindakan manusia (Kolodziej, 2005 : 22).

Dalam konsepsi klasik, keamanan lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Konflik antar negara khususnya dalam upaya memperluas imperium daerah jajahan membawa definisi *security* hanya ditujukan kepada bagaimana negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Dalam pendekatan tradisional, negara (*state*) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam

pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara (Al Araf & Aliabbas, 2007).

Perkembangan isu-isu strategis seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan. Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (non-state actors). Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara/ keamanan manusianya (Al Araf & Aliabbas, 2007).

Pemikiran yang kurang lebih sama dikembangkan oleh pendekatan *critical securiy studies* (studi keamanan kritis). Pendekatan ini menolak asumsi bahwa keamanan dicapai melalui akumulasi kekuatan. Sebaliknya, ia beranggapan bahwa pondasi dari keamanan adalah keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Collins, 2005).

Meminjam pendapat Booth, Collins berargumen bahwa keamanan tercipta ketika terjadi pembebasan manusia dari keterbatasan-keterbatasannya. Keterbatasan tersebut dapat bersifat struktural yang dipengaruhi oleh sistem internasional, maupun keterbatasan yang diciptakan oleh elit-elit politik. Pembatasan struktural termasuk misalnya dalam sistem perdagangan internasional yang cenderung memihak negara maju. Keterbatasan yang diciptakan elit politik misalnya adalah diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, pencapaian kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial, melalui penyediaan pendidikan, pengurangan kemiskinan, kebebasan dari tekanan politik, akan membuat individu maupun kelompok mendapatkan keamanannya (Collins, 2005).

Sama halnya dengan negara. Negara yang memberikan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial bagi warganya dapat menciptakan masyarakat keamanan tersendiri, sekaligus mengeliminasi kekuatan bersenjata sebagai sarana

pemecahan masalah keamanan. Maka, bagi Critical Security Studies, keamanan hadir ketika masyarakat terbebaskan dari kemiskinan (bebas berkeinginan/freedom from want) dan bebas dari ketakutan (freedom from fear).. Bukan dengan cara memantapkan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan tertentu yang cenderung membatasi kebebasan masyarakat (Collins, 2005).

Satu pendekatan lain yang hampir serupa dengan keamanan non tradisional dan merupakan antitesis dari keamanan tradisional adalah keamanan alternatif (alternative security). Pendekatan ini menjadi rumah bagi tiga pandangan keamanan non tradisional yaitu konstruktivisme (constructivism), sekuritisasi (securitization) dan keamanan manusia (human security). *Constructivism, securitization dan human security* telah cukup lama menjadi perhatian dalam debat akademik tentang keamanan internasional. Human security sedikit lebih maju dalam hal ini karena telah diadopsi dan menjadi identitas resmi dalam kebijakan luar negeri di tiga negara maju, yaitu Kanada, Norwegia, dan Jepang (Tow dalam Tan & Boutin, 2001 : 258).

Pendukung pendekatan constructivism menolak gagasan bahwa kapabilitas materiil seperti kekuatan (power) dan sumber daya (resources) adalah komponen utama dalam menentukan perang dan damai. Sebaliknya, mereka beranggapan bahwa kekuatan dari perubahan-perubahan sosial lebih mempengaruhi politik keamanan internasional kontemporer. Institusi-institusi keamanan berkembang dan merupakan ekspresi dari praktek-praktek dan pengetahuan sosial budaya, daripada sekedar respon terhadap anarkisme regional dan internasional (Tow dalam Tan & Boutin, 2001 : 259).

Berbeda dengan constructivism, pendekatan securitization menaruh perhatian pada konsep masyarakat keamanan (societal security) daripada keamanan yang berasal dari kedaulatan negara (state sovereignty). Gagasan utama dari pendekatan ini adalah menolak dominasi pihak tertentu (apakah negara atau masyarakat) dalam menafsirkan dan menetapkan keamanan. Keamanan dipandang sebagai dikonstruksikan secara sosial (socially constructed) oleh elit tertentu. Keamanan menjadi suatu praktek `self referential`. Suatu isu menjadi isu keamanan tidak semata-mata karena eksistensi ancaman keamanan yang nyata-

nyata terjadi melainkan karena isu tersebut dipersepsikan sebagai ancaman (Tow in Tan & Boutin, 2001 : 263).

Salah satu paradigma keamanan alternatif yang juga bersifat non tradisional adalah human security (keamanan manusia). Paradigma ini seringkali diposisikan berpasangan dan senafas dengan comprehensive security, sebagai pendekatan yang memandang keamanan tidak semata-mata dari perspektif kemiliteran namun juga non militer.

Konsep *human security* muncul antara lain melalui laporan badan PBB UNDP (United Nations Development Program) pada tahun 1994. Pemikiran utama dari konsep ini adalah bahwa berakhirnya perang dingin seharusnya mengubah juga paradigma keamanan dari keamanan nuklir menuju keamanan manusia. Badan PBB ini berpendapat bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak di dalam negara (within nations) daripada antar negara (*international conflicts*). Bagi banyak orang, perasaan tidak aman lahir lebih banyak dari kehidupan sehari-hari daripada akibat peristiwa dunia tertentu. Misalnya, apakah mereka memiliki cukup makan? tak akan kehilangan pekerjaan? Aman berjalan di jalan umum? Akankah mereka menjadi korban karena status gender-nya? Akankah asal usul agama atau etnis mereka akan menyebabkan mereka menjadi korban penyiksaan? Pada analisis akhirnya, human security adalah identik dengan anak-anak yang tidak mati, penyakit yang tidak menyebar, pekerjaan yang tidak dihentikan, konflik etnis yang tidak berujung pada kekerasan. Human security tidak berurusan dengan senjata. Lebih berurusan pada kehidupan manusia dan martabatnya (UNDP, 1994).

Laporan UNDP 1994 menekankan pemaknaan human security sebagai sesuatu yang universal. Relevan dengan semua manusia dimanapun. Karena ancaman keamanan dalam human security bersifat umum. Dimanapun terjadi tak memandang tapal batas negara. Human security memusatkan perhatian pada manusia (people-centered) dan bukan negara (state-centered), dengan memaknai keamanan pada tujuh wilayah yaitu : keamanan ekonomi (economic security), makanan (food security), kesehatan (health security), lingkungan (environmental security), pribadi/ individu (personal security), komunitas (community security) dan politik (political security).

Konsep tersebut juga mengidentifikasi enam ancaman terhadap human security yaitu : pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, disparitas peluang-peluang ekonomi, tekanan migrasi penduduk, degradasi lingkungan, perdagangan narkoba, dan terorisme internasional (Smith, 2002).

Konsep Comprehensive Security, di sisi lain, adalah konsep keamanan yang paling banyak digunakan di Asia Pasifik. Konsepsi ini pertama kali diperkenalkan oleh Jepang pada tahun 1970-an. Premis utama dari comprehensive security adalah bahwa keamanan harus dimaknai dalam pengertian yang holistik (holistic way), mencakup baik ancaman militer maupun ancaman non militer. Tafsir Jepang terhadap comprehensive security adalah bahwa kekuatan militer saja tak cukup untuk menjamin keamanan nasional. Maka, Jepang menekankan pula pada perluasan kebijakan non militer seperti pendayagunaan sumber daya politik, ekonomi, dan diplomatik.

Salah satu wujud *comprehensive security* ini adalah ketika pada tahun 1986 pemerintah PM Yasuhiro Nakasone membentuk Dewan Keamanan Nasional. Dewan ini ditugaskan untuk menjamin kesiapsiagaan militer namun pada saat bersamaan juga berurusan dengan penanggulangan situasi darurat non militer seperti bencana alam (Capie & Evans, 2002).

Kebijakan yang hampir sama terdapat di Thailand. Pada section (4) dari Thailand Civil Defence Act tahun 1979, pengertian civil defence (pertahanan sipil) adalah operasi yang dilaksanakan oleh otoritas pertahanan sipil dalam rangka melindungi ataupun memberikan bantuan dalam terjadinya bencana publik, ancaman udara ataupun sabotase, baik sebelum, selama, dan sesudah terjadinya bencana, termasuk evakuasi manusia dan fasilitas pemerintahan. Bencana publik adalah bencana yang datang dari api, badai, maupun banjir baik yang terjadi karena alam maupun karena peran manusia yang mengorbankan nyawa manusia, dan menghancurkan properti milik rakyat maupun negara.

### 3.6. Pengertian Keimigrasian dan Visa Republik Indonesia

#### 3.6.1. Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain (M. Iman Santoso, 2004). Ada istilah *emigratio* yang memiliki arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antarnegara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah kenegara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi.

Konferensi internasional tentang emigrasi dan imigrasi, tahun 1924 di Roma memberikan definisi imigrasi sebagai suatu: “*Human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence.*” (Gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana).

Ketika muncul konsep negara dan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu, maka, dalam melakukan perlintasan antarnegara, digunakan paspor yang secara harfiah berarti melewati (pintu masuk) pelabuhan. Paspor adalah pas atau izin melewati pelabuhan atau pintu masuk, yang berasal dari kata *to pass* yaitu melewati, dan *port* yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya. Oleh karena itu negara yang mengeluarkan berkewajiban memberi perlindungan hukum dimana pun kepada pemegang berada. Selain itu di dalam paspor dicantumkan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan pemegang paspor berlalu secara leluasa, memberi bantuan, dan perlindungan kepadanya di dalam melintasi batas suatu negara.

Kemudian di dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa. Istilah visa berasal dari kata Latin *visum* yang artinya laporan atau keterangan telah diperiksa. Kemudian,

istilah visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterakan pada paspor, yang menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara tujuan, di luar negeri, untuk memasuki negara asal pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu negara. Dalam pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara dan setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali kenegerinya sendiri.

Keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 9/1992) adalah hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan gramatikal (tata bahasa) dan pendekatan semantik (ilmu tentang arti kata) definisi keimigrasian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai keadaan, peristiwa, kejadian (sesuatu yang terjadi). Sementara ihwal diartikan sebagai perihal. Dengan demikian, hal-ihwal diartikan sebagai berbagai keadaan, peristiwa, atau kejadian.
- Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata lalu-lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dengan tempat lain, hilir mudik, bolak-balik.

Dengan demikian, menurut UU No. 9/92 terdapat dua unsur pengaturan yang penting, yaitu:

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.

Mengacu pada konsepsi wawasan nusantara yang antara lain menyatakan bahwa batas teritorial negara Indonesia merupakan satu kesatuan geografis baik itu berupa daratan, lautan, dan udara. Berdasarkan batas-batas teritorial negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional maka timbal yurisdiksi hukum Indonesia atas setiap orang, benda, dan perbuatan yang berada dan terjadi dibawah dan di atas wilayah Indonesia. Operasionalisasi konsep wawasan nusantara dikaitkan dengan batas-batas teritorial ini sesuai dengan prinsip umum hukum internasional yang dikemukakan oleh Lord Macmillan yang menyatakan:

“Adalah statu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap orang, benda, dan perbuatan dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam perbuatan batas-batas teritorial ini.”

Demikian pula dari sudut pandang keimigrasian bahwa dalam lingkup batas-batas teritorial, keimigrasian berfungsi untuk meminimalisasikan dampak negatif dan mendorong dampak positif dari yurisdiksi sementara (transient jurisdiction) yang timbul akibat keberadaan orang asing yang bersifat sementara itu selama berada dalam wilayah Indonesia. Peran keimigrasian seketika muncul saat orang asing melintasi batas wilayah Indonesia. Oleh karena itu fungsi keimigrasian dapat berada di darat, laut, dan udara wilayah Indonesia. Ada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan sebagai pintu masuk atau keluar (entry point/border crossing).

Pada tempat-tempat itu dilakukan *clearance* yang secara universal dilaksanakan oleh *Immigration* (imigrasi) juga disertai fungsi-fungsi lainnya seperti *Custom* (Bea dan Cukai) dan *Quarrantine* (karantina), yang bekerja secara bersama-sama dalam suatu perlintasan. Imigrasi untuk *clearance* perlintasan manusia, Bea Cukai untuk *clearance* perlintasan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsi-fungsi ini secara internasional dikenal sebagai CIQ (*Custom, Imigration, Quarrantine*) dan merupakan fungsi-fungsi pokok di wilayah lintas batas teritorial. Di samping juga melihat adanya fungsi kepolisian dan militer yang keadaan normal bekerja sebagai fungsi supporting system. Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan militer fungsi pertahanan. Contoh

dalam pemeriksaan kapal yang berlabuh pada perairan pedalaman Indonesia sebelum menaikkan dan menurunkan orang atau barang harus terlebih dulu menaikkan bendera “N” yang berarti mempersilahkan petugas imigrasi mengadakan clearance. Tanpa clearance dari imigrasi, maka setiap orang yang Turun dari kapal dianggap secara tidak sah memasuki wilayah Indonesia dan atas tindakan itu diancam pidana. Apabila *clearance* telah selesai selanjutnya diikuti clearance oleh *Custom* dan *Quarrantine*. Dalam pandangan teknis imigratoir, *immigration clearance* diartikan sebagai penyelesaian pendaratan pada saat perlintasan di entry point (dengan pengertian pendaratan masuk atau pendaratan keluar).

Ada suatu pandangan yang salah yang beranggapan bahwa fungsi keimigrasian hanya dilakukan di pelabuhan udara atau pelabuhan laut saja. Hal ini disebabkan kita terbiasa melihat petugas imigrasi hanya bertugas pada kedua tempat itu saja. Pengertian batas teritorial negara dari sudut pandang keimigrasian, secara geografis dapat dibagi dalam pengertian:

Batas garis wilayah teritorial “luar”, yaitu batas teritorial negara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan batas-batas garis wilayah negara Indonesia yang telah ditetapkan dan diakui secara internasional sebagai batas teritorial “luar” berdasarkan: (1) UU No.4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia; (2) UU No.7/1973 tentang Landas Kontinen; (3) UU RI No.6 thn.1973 tanggal 8 Desember 1973 tentang batas antara Indonesia dengan Papua New Guniea; (4) Keppres No.89 thn.1969 tanggal 5 November 1969 tentang Batas antara Indonesia dengan Malaysia. Dalam ruang lingkup ini fungsi keimigrasian pada dasarnya mempunyai tugas untuk mengamati, mengatur, dan menjaga seluruh pelintasan manusia baik masuk maupun keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh pelintasan perbatasan darat di Entikong, Kalimantan Barat atau perlintasan laut di Kepulauan Natuna-Riau, secara fisik kedua tempat tersebut berada pada garis batas teritorial negara.

Batas garis wilayah teritorial “dalam”, yang dimaksud di sini adalah batas-batas yang terdapat di dalam area pelabuhan laut atau udara internasional yang memisahkan wilayah internasional dengan wilayah nasional. Contoh: Pada pelabuhan udara internasional seperti Bandara Sukarno Hatta-Jakarta atau

Bandara Juanda-Surabaya, atau pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta terdapat batas yang secara fisik berbentuk sebuah garis kuning (a yellow line) atau dikenal sebagai immigration line yang terdapat di depan arrival atau departure immigration counter. Di belakang garis kuning itu sampai pada pintu pesawat dapat diartikan sebagai wilayah internasional (international area atau sterile area) dan dalam pesawat/kapal laut berlaku hukum negara di mana pesawat itu terdaftar.

Dalam perspektif keimigrasian setiap orang dianggap telah melewati garis wilayah perbatasan teritorial ketika telah melewati pemeriksaan keimigrasian untuk memproses pendaratan bagi setiap pelintasan baik masuk maupun keluar. Pelabuhan udara atau laut secara fisik kedua titik tersebut berada di dalam garis wilayah batas teritorial suatu negara dan merupakan bagian dari wilayah darat atau wilayah perairan pedalaman yang sepenuhnya bagian dari yurisdiksi negara. Namun berdasarkan konvensi internasional disepakati bahwa di dalam suatu pelabuhan udara atau laut internasional terdapat wilayah internasional yang berfungsi sebagai sterile area, hanya orang yang telah melewati immigration clearance yang dapat masuk atau keluar melintasi garis kuning (immigration line).

### **3.6.2. Visa Republik Indonesia**

Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

Visa Republik Indonesia dapat berbentuk Cap Dinas atau lembaran kertas yang dilampirkan pada paspor. Bisa juga berbentuk Kartu biasa atau Kartu elektronik. Visa tersebut dapat diberikan berdasarkan permohonan, namun pengurusannya dapat dikuasakan pada orang lain. Visa Diplomatik atau Visa Dinas, hanya dapat diberikan kepada pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas. Untuk permohonannya, wajib disertai nota diplomatik atau nota dinas, kecuali Visa Diplomatik dan Dinas, permohonan visa dapat dikuasakan kepada pihak lain. Permohonan visa diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik

Indonesia di luar negeri atau kepada pejabat di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Visa yang telah diberikan harus dipergunakan dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak tanggal visa tersebut dikeluarkan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui, orang asing yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ulang.

Selain Visa yang diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, terdapat juga kemudahan pengajuan visa pada saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditentukan oleh Menteri. Perolehan visa tersebut dinamakan *visa on arrival* (visa saat kedatangan) yang dapat diberikan kepada orang asing yang ingin melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka bisnis, tugas pemerintahan, berlibur dan lain sebagainya kecuali tidak bekerja. Perolehan visa ini sangat mudah mengingat seseorang hanya memperlihatkan paspor dan membayar biaya keimigrasian sebesar US \$10 untuk tinggal dan berada di Indonesia selama 7 hari, dan US \$25 untuk jangka waktu tinggal dan berada di Indonesia selama 30 hari.

### **3.7. Pengertian Transportasi**

Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (subway) dan taksi. Penduduk disana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Transportasi sendiri dibagi 3 (tiga) yaitu, transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.

Transportasi atau perangkutan adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (*trip*) antara asal (*origin*) dan tujuan

(*destination*). Perjalanan adalah pergerakan orang dan barang antara dua tempat kegiatan yang terpisah untuk melakukan kegiatan perorangan atau kelompok dalam masyarakat. Perjalanan dilakukan melalui suatu lintasan tertentu yang menghubungkan asal dan tujuan, menggunakan alat angkut atau kendaraan dengan kecepatan tertentu. Jadi perjalanan adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada lima unsur pokok transportasi, yaitu:

- a) Manusia, yang membutuhkan transportasi
- b) Barang, yang diperlukan manusia
- c) Kendaraan, sebagai sarana transportasi
- d) Jalan, sebagai prasarana transportasi
- e) Organisasi, sebagai pengelola transportasi

Pada dasarnya, ke lima unsur di atas saling terkait untuk terlaksananya transportasi, yaitu terjaminnya penumpang atau barang yang diangkut akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada saat awal diangkut. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dulu ciri penumpang dan barang, kondisi sarana dan konstruksi prasarana, serta pelaksanaan transportasi. Moda transportasi terbagi atas tiga jenis moda, yaitu:

a. Transportasi darat: kendaraan bermotor, kereta api, gerobak yang ditarik oleh hewan (kuda, sapi, kerbau), atau manusia. Moda transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor:

- Jenis dan spesifikasi kendaraan
- Jarak perjalanan
- Tujuan perjalanan
- Ketersediaan moda
- Ukuran kota dan kerapatan permukiman
- Faktor sosial-ekonomi

b. Transportasi air (sungai, danau, laut): kapal, tongkang, perahu, rakit.

c. Transportasi udara: pesawat terbang. Transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat ditempuh dengan moda darat atau laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan.

### **3.8. Pengertian Akomodasi**

Akomodasi adalah suatu sarana untuk tempat penginapan bagi setiap tamu atau pengunjung sementara, dengan mendapatkan berbagai fasilitas lainnya seperti makan dan minum, olahraga, kesehatan, hiburan dan kebutuhan lain. Akomodasi merupakan suatu bangunan yang memiliki kamar-kamar dan fasilitas lain seperti bar dan restoran yang disediakan untuk para tamu baik yang dikelola secara sederhana maupun profesional.

Akomodasi dalam dunia pariwisata lazimnya berbentuk hotel, motel bungalows, penginapan, losmen dan lain sebagainya yang merupakan rumah sementara bagi wisatawan. Standar akomodasi dalam dunia pariwisata mengikuti rekomendasi dalam konferensi *Pasific Area Travel Association (PATA)* San Fransisco, California 1978. Di Indonesia akomodasi untuk wisatawan pada umumnya mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi.

### **3.9. Kurs atau Nilia tukar**

Kurs atau nilai tukar adalah nilai tukar mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain. Kurs (nilai tukar) timbul ketika penawaran dan permintaan barang, jasa dan aliran modal berada dalam keseimbangan. Sebagai contoh permintaan dolar Amerika Serikat berasal dari keinginan masyarakat Indonesia untuk mengimpor komoditi Amerika Serikat dan sebagainya. Penawaran dolar Amerika Serikat timbul dari keinginan masyarakat Amerika Serikat terhadap saham dari perusahaan Indonesia atau produk Indonesia lainnya. Harga valuta asing terbentuk pada saat penawaran dan permintaan berada dalam keseimbangan.

Kebijaksanaan pemerintah dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya terhdap mata uang negara lain. Selain itu, nilai tukar juga dipengaruhi oleh aliran ekspor dan impor barang, jasa, dan kapital keluar dan masuk ke suatu negara. Meskipun demikian banyak faktor yang berinteraksi satu sama lainnya dalam perekonomian, kemampuan perekonomian dan kesempatan kerja juga mempunyai implikasi pada keseimbangan neraca pembayaran dan akhirnya pana nilai tukar.

Selin itu, terdapat dua variabel ekonomi yang mempunyai pengaruh langsung terhadap nilai tukar yakni;

1. Tingkat inflasi dalam negeri dibandingkan secara leatif dengan inflasi negara-negara lain;
2. Tingkat bunga dalam negeri dibandingkan dengan persaingan tingkat bunga luar negeri.

Berkaitan dengan pariwisata, kurs mata uang suatu negara terhadap negara lain dapat mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan perjalanan dalam rangka wisata. Tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang wisatawan setibanya di suatu negara tujuan wisata adalah menukarkan uangnya dengan mata unag setempat. Hal ini dapat dilakukan menurut nilai tukar resmi yang ditetapkan secara oleh masing-masing negara. Namun kadang kala perbandingan nilai tukar ditentukan oleh harga pasaran bebas sesuai dengan daya beli masing-masing mata uang dan kepercayaan masyarakat negara itu terhadap mata uang negara tersebut atau dalam kaitannya dengan harga emas (bagi negara-negara yang berdasarkan standar emas)(Wahab dalam Fran Gromang, 2003).

Pada masa resesi ekonomi sebagaimana terjadi saat ini, nilai mata uang suatu negara mungkin merosot tajam karena kegagalannya meyakinkan kepercayaan masyarakat. Transaksi-transaksi pasaran gelap dan nilai tukar tidak resmi mungkin kemudian bermunculan. Dapat dikatakan bahwa cara termudah membandingkan biaya pariwisata pada dua negara yang berbeda dapat menggunakan nilai tukar mata uang resmi.

Wisatawan asing pada umumnya cenderung hanya menghitung dan membanding-bandingkan harga-harga paket wisata tanpa memperdulikan untuk membandingkan jasa-jasa wisata yang diberikan di berbagai negara.

### **3.10. Analytical Hierarchy Process (AHP)**

Teori keputusan merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara bertindak. Berbagai macam metode analitik dipakai untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan termasuk keputusan untuk berwisata. Terdapat tiga jenis teori keputusan sebagai berikut:

- a. Keputusan dibawah kondisi kepastian

Pengambilan keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih.

b. Keputusan dibawah resiko

Pengambilan keputusan mengetahui kemungkinan (probability) akan terjadinya suatu kejadian atau konsekuensi dari setiap pilihan.

c. Keputusan dibawah kepastian

Pengambilan keputusan tidak mengetahui probabilitas kejadian yang akan terjadi untuk setiap alternatif.

Kerumitan masalah pengambil keputusan bukan hanya terletak pada ketidakpastian atau ketidaksempurnaan informasi, tetapi juga disebabkan karena kita berhadapan dengan masalah yang sangat kompleks karena banyak faktor yang ikut terkait. Thomas L Saaty, professor pada Whorton School of Economics, Amerika Serikat (1971-1975), mengembangkan metode analisis keputusan selain yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP). Menurut Saaty, kerumitan dalam pengambilan keputusan adalah keragaman kriteria.

Dalam perkembangan AHP tidak hanya digunakan untuk menentukan prioritas pilihan dengan banyak kriteria tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan peramalan. Sangat pesatnya perkembangan informasi dan transformasi pada saat ini, mengakibatkan sistem dunia yang semakin kompleks karena berbagai elemen akan saling berinteraksi baik dibidang sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan jaringan yang semakin rumit dengan banyak faktor, menyebabkan sulit mengidentifikasi sebab akibat suatu masalah. Hubungan antara faktor-faktor sangat rumit dan tidak mudah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dalam sistem yang kompleks tersebut maka kita harus membuat prioritas. Pada dasarnya metode AHP yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty adalah memecah-mecah suatu situasi kedalam bagian-bagian komponennya dan menata bagian atau variabel ini kedalam suatu susunan hierarki.

Kesulitan dalam menjawab bahwa suatu tindakan adalah lebih baik dari tindakan yang lain, disebabkan karena dua hal berikut:

1. Pengaruh tersebut tidak dapat dibandingkan karena ukurannya atau bidangnya berbeda.

2. Pengaruh itu terkadang saling konflik, yaitu kebaikan pengaruh yang satu hanya dapat dicapai dengan keburukan pengaruh lainnya.

Kondisi tersebut diatas akan menyulitkan dalam membuat ekivalensi antar pengaruh. Untuk itu diperlukan suatu skala yang luwes yang disebut prioritas yaitu suatu ukuran abstrak yang berlaku untuk semua skala. Penentuan skala ini yang akan dilakukan dengan menggunakan AHP. Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, beberapa prinsip yang harus dipahami adalah Dekomposisi, Comparative Judgment, Sintesis Prioritas dan Logic Consistency.

### **Dekomposisi (memecah/menguraikan)**

Persoalan yang telah didefinisikan, kemudian dilakukan dekomposisi yaitu dengan memecah persoalan yang utuh tersebut menjadi unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dapat dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga akan diperoleh beberapa tingkat dari persoalan tersebut yang kita sebut sebagai hirarki. Berdasarkan permasalahannya terdapat dua jenis hirarki yaitu lengkap dan tidak lengkap. Hirarki lengkap adalah semua elemen pada suatu tingkat memiliki semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya, sedangkan hirarki tidak lengkap tidak demikian adanya.

### **Comparative Judgemen (penyesuaian perbandingan)**

Konsep ini memberikan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang berada diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari arti AHP, karena akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil penilaian akan lebih mudah dilihat dan dipahami bila disajikan dalam bentuk matriks (tabel) yang akan disebut matrik berpasangan (*pairwise comparison*).

Pertanyaan yang sering digunakan dalam penyusunan skala kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Elemen mana yang lebih (penting/disukai/mungkin/....)?
2. Berapa lebih (penting/disukai/mungkin/.....)?

Dalam menentukan skala prioritas dipakai patokan sebagai berikut:

**Tabel.3.1. Skala Tingkat Kepentingan**

No	Tingkat Kepentingan	Arti
1	1	Sama penting satu sama lainnya
2	3	Agak penting dibanding yang lain
3	5	Lebih penting dibanding yang lain
4	7	Sangat penting dibanding yang lain
5	9	Mutlak penting dibanding yang lain
6	2,4,6,8	Nilai diantara dua penilaian yang berdekatan

Perlu dipahami, dalam menilai kepentingan relatif dua elemen berlaku aksioma berbalikan (*reciprocal*). Misalnya A dinilai 3 kali B, maka otomatis B adalah sepertiganya atau dalam bahasa matematika jika  $A=3B$  maka  $B=1/3A$ .

### Sintesis Prioritas

Setiap matrik berpasangan (*pairwise comparison matrix*) dapat dicari eigen vektornya untuk mendapatkan prioritas lokal. Sedangkan untuk mendapatkan prioritas yang menyeluruh (*global priority*) harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal dan prosedur untuk melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hirarkinya.

### Consistency Logic

Terdapat dua arti konsistensi yaitu:

1. Obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansinya. Misalnya: anggur dan kelereng dapat dikelompokkan dalam ukuran yang sama karena keduanya sama-sama berbentuk bulat tetapi jika hirarkinya adalah rasa maka keduanya tidak dapat dikelompokkan.

2. Menyangkut tingkat hubungan antar obyek yang didasarkan atas hirarki tertentu. Miasalnya: madu 5 kali lebih manis dari gula dan gula 2 kali lebih manis dari sirup, maka madu 10 kali lebih manis dari sirup. Apabila madu hanya 3 kali lebih manis dari sirup maka penilaian tersebut tidak konsisten dan proses penilaian harus diulangi kembali untuk memperoleh sintesis penilaian yang lebih tepat.

Terdapat beberapa cara untuk menentukan prioritas terhadap matrik berpasangan, namun dalam AHP menekankan pada konsistensi, maka digunakan eigen vektor yang merupakan konsep matematika teori matriks.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengembangan pariwisata akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui perluasan dan pemanfaatan sumber serta potensi pariwisata nasional sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan devisa.

Pengembangan pariwisata internasional tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dibidang keimigrasian yang diberlakukan pemerintah terhadap wisman dalam hal prosedur dan persyaratan untuk masuk ke Indonesia. Untuk itu dalam usaha mengembangkan pariwisata internasional sangat diperlukan program yang terarah dan tepat dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kegiatan promosi dan perbaikan dari berbagai fasilitas dan pelayanan yang diperlukan wisman, seperti pelayanan imigrasi, fasilitas angkutan, perbankan, akomodasi, restoran, biro perjalanan dan sebagainya.

Perubahan-perubahan global dunia pada masa sekarang ini akan berpengaruh terhadap segala aspek yang berhubungan dengan perkembangan-perkembangan pariwisata. Faktor stabilitas politik dan keamanan, kebijakan pemerintah (regulasi di bidang keimigrasian), transportasi, akomodasi, dan nilai tukar(kurs) akan menentukan kenaikan jumlah wisman berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini meliputi beberapa pokok bahasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komposisi bobot prioritas faktor- faktor yang menjadi pertimbangan wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa yang

diperoleh, yaitu dengan menggunakan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*): dengan membuat matrik perbandingan pilihan untuk faktor-faktor dominan yang meliputi Keamanan, Kemudahan Visa, Transportasi, Akomodasi, dan Kurs.

2. Untuk mengetahui komposisi pilihan tempat-tempat wisata di Indonesia oleh tamu mancanegara dengan menggunakan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan membuat matrik perbandingan pilihan untuk tempat-tempat dominan bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia yang meliputi Bali, Yogyakarta, dan Sumatera.

